

Konsep Kesejahteraan Islam dan Barat: Perbandingan Paradigmatik dan Implikasinya terhadap Etika Ekonomi

Muhammad Yassir Fahmi^{a*}, Lusiana Handayani^b, Aneta Rakhmawati^{c*}
^{abc}Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin
Indonesia

*Corresponding Author: myassirfahmi@akuntansipoliban.ac.id

Abstract

The difference in worldview and scientific methods between Western and Islamic scholars results in differences in explaining the concept of welfare and the practices to achieve it. This study aims to explain the differences in the concept of welfare between the Western and Islamic perspectives using a systematic literature review method. Based on the research results, it was found that the concept of welfare is born from theories about human needs. Muslim scholars differ from Western scholars in explaining the theory of human needs, namely by making religion the primary and priority need in human life. Therefore, the concept of welfare from the Islamic perspective is the fulfillment of human needs, both material and spiritual aspects, to obtain happiness in this world and the hereafter. Meanwhile, Western scholars negate religion as an important and priority aspect in fulfilling human needs. Thus, the concept of welfare from the Western perspective is understood as the fulfillment of material and non-material needs, but it does not bring human happiness. The difference in the concept of welfare between the two also gives rise to differences in economic ethics. The concept of welfare from the Islamic perspective will make society practice economics with values, ethics, and morals (akhlak mahmudah). Conversely, the concept of welfare from the Western perspective will make utilitarianism the ethic in economics. The ethics of utilitarianism view that morality is determined by the consequences of human behavior.

Keywords: *Islamic Welfare; Muslim Scholars; Needs; Welfare; Western Perspective*

Abstrak

Perbedaan pandangan dunia (*worldview*) dan metode keilmuan antara ilmuwan Barat dan Islam menghasilkan perbedaan dalam menjelaskan konsep tentang kesejahteraan dan praktik untuk mewujudkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan konsep kesejahteraan antara perspektif Barat dan Islam dengan menggunakan metode sistematik literature review. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsep kesejahteraan lahir dari teori tentang kebutuhan hidup manusia. Ilmuwan Muslim berbeda dalam menjelaskan teori

kebutuhan hidup manusia dengan ilmuan Barat, yaitu menjadikan agama sebagai kebutuhan utama dan prioritas dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia baik dari aspek materi maupun spiritual untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ilmuan Barat menafikan agama sebagai aspek penting dan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga konsep kesejahteraan dalam perspektif dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat materi dan non-materi namun tidak mendatangkan kebahagiaan manusia. Perbedaan konsep kesejahteraan antara keduanya juga melahirkan perbedaan dalam etika ekonomi. Konsep kesejahteraan perspektif Islam akan menjadikan masyarakat mempraktikkan ekonomi dengan nilai, etika dan moral (*akhlak mahmudah*). Sebaliknya, konsep kesejahteraan perspektif Barat akan menjadikan utilitarianisme sebagai etika dalam ekonomi. Etika utilitarianisme memandang bahwa moralitas ditentukan dari konsekuensi perilaku manusia.

Kata kunci: Ilmuan Muslim; Kebutuhan; Kesejahteraan; Kesejahteraan Islam; Perspektif Barat

@IJAAF 2025 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Sebuah teori lahir dari metodologi ilmu pengetahuan. Sedangkan sebuah metodologi ilmu pengetahuan terbentuk karena *worldview* (cara pandang terhadap dunia). *Worldview* seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan sejarah yang melatarbelakangi kehidupan peradaban manusia serta interaksi manusia dengan realitas kehidupan (Furqani, 2018).

Sejarah peradaban Barat pernah mengalami masa kegelapan ketika gereja menjadi satu-satunya otoritas yang memengaruhi dan menentukan kehidupan masyarakat Barat, baik pada aspek politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Masyarakat Barat saat itu tidak mempunyai kebebasan mengaktualisasikan diri, dan ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang karena di bawah pengawasan gereja dan harus mendapatkan persetujuan gereja. Demikian pula dalam hal berpikir dan menyatakan pendapat senantiasa ditekan dan dikekang secara ketat sementara para ilmuwan sering kali dianggap sebagai orang-orang murtad karena berbeda dengan penafsiran ilmu pengetahuan menurut gereja. Keadaan yang seperti inilah yang memicu gerakan dan paham sekulisme di masyarakat Barat. Sekularisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Dalam Wikipedia, sekularisme juga merujuk kepada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang bersifat politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Sejarah inilah yang membentuk

worldview masyarakat Barat dalam membentuk metodologi ilmu pengetahuan. Sehingga melahirkan metodologi yang bebas dari pengaruh agama.

Berbeda dengan masyarakat muslim yang yang tidak mempunyai pengalaman sejarah seperti yang dialami masyarakat Barat. Ilmuan Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dengan doktrin agama Islam. *Worldview* Islam menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam ilmu pengetahuan (*theocentric*) dan membangun ilmu pengetahuan berlandaskan petunjuk-petunjuk yang digariskan-Nya (Furqani, 2018). Oleh karena teori yang dihasilkan dari metodologi ilmu pengetahuan dalam Islam dipenuhi nilai-nilai agama Islam yang universal. Berdasarkan perbedaan *worldview* dan metodologi antara masyarakat Barat dan muslim, maka tentunya teori tentang kesejahteraan antara keduanya juga berbeda.

2. Metode Penelitian

Artikel ini membahas perbedaan teori kesejahteraan perspektif Barat dan Islam dengan metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2008). Berdasarkan definisi ini, maka penulis melakukan langkah-langkah yang diperlukan, yaitu: (1) mengumpulkan buku, jurnal, informasi cetak atau semua referensi terkait pembahasan; (2) membaca semua referensi terkait; (3) mencatat referensi-referensi tersebut; dan (4) mengolah dan menganalisis referensi sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Analisis dilakukan secara komparatif dengan melihat persamaan dan perbedaan dari kedua objek bahasan, yaitu konsep kesejahteraan perspektif Barat dan Islam.

Saat ini kesejahteraan lebih banyak dimaknai dari perspektif kapitalisme dan komunisme sehingga praktik dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan tersebut juga dipengaruhi dan diwarnai oleh kedua paham tersebut (Chapra, 2000). Pemaknaan konsep kesejahteraan serta praktik dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan seperti ini tidak akan bisa menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seseorang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang memiliki harta yang melimpah dan barang-barang yang mewah serta ketenaran, namun tetap merasa tidak bahagia dan dalam beberapa kasus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri (Sodiq, 2015). [MOU1][lh2]Fakta ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam memahami makna kesejahteraan serta praktik dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan tersebut.

Tujuan dari ilmu ekonomi adalah kesejahteraan dan kemakmuran

pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kajian tentang konsep, indikator, dan praktik untuk mencapai kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dalam kajian ilmu ekonomi. Banyak sekali akademisi di bidang ekonomi Islam yang mengkaji dan menawarkan konsep kesejahteraan berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Purwana (2014) [MOU3][lh4] menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmateri. Sedangkan untuk memperoleh kesejahteraan diperlukan kesadaran baik individu maupun masyarakat untuk mentaati hukum Allah dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Pusparini (2015) [MOU5][lh6] juga menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kewajiban pemenuhan kebutuhan manusia secara material dan spiritual yang terjalin dengan erat, berjuang untuk sebuah keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Sedangkan, untuk mewujudkannya yaitu dengan memenuhi *maqashid syariah*. Lebih rinci lagi Wahab (2020) [MOU7][lh8] membagi konsep kesejahteraan ke dalam tiga aspek, yaitu aspek individu, keluarga, dan negara. Beliau menjelaskan untuk mewujudkan kesejahteraan setiap aspek tersebut memerlukan pemahaman dari konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), pemanfaatan kepemilikan (*al-tasharufi al-milkiyah*) dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat (*tauzi' al-Tsarwah bayna al-naas*). Diperlukan juga “*power of government*” sebagai pemangku urusan dan perwakilan dari rakyatnya dengan “*good and justice basic*” dalam setiap kebijakan dan peraturannya.

Semua tulisan di atas menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan manusia baik materi maupun non materi. Namun para penulis tidak menjelaskan secara rinci tentang teori kebutuhan baik menurut ilmuwan Barat maupun Islam. Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan perbandingan konsep kesejahteraan menurut ekonomi Islam Barat berdasar teori kebutuhan menurut Islam dan Barat. Sehingga penjelasan tentang konsep kesejahteraan akan bisa lebih komprehensif dimaknai dan dipahami.

3. Hasil dan Pembahasan

Definisi Kesejahteraan

“Kesejahteraan” berasal dari kata “sejahtera,” yang memiliki makna aman, sentosa dan makmur; selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan kesempitan. Keadaan sejahtera mencakup jaminan sosial keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran (Lukman, 1996). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan juga memiliki padanan kata, yaitu “maslahat”.

Maşlahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Kementerian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mendefinisikan sejahtera sebagai suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Berikut juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam bahasa Inggris, kesejahteraan disebut dengan *welfare*. *Welfare* mempunyai arti *the good health, happiness, comfort, etc of a person or group*. Kesejahteraan berarti kondisi yang sehat, bahagia, nyaman, dan sebagainya, baik individu maupun kelompok (Sidney et al., 1995). Sedangkan dalam bahasa Arab, kesejahteraan adalah terjemahan dari kata "*rofahiyah*" yang berarti kenyamanan dan kemakmuran.

Berdasarkan beberapa definisi dari berbagai bahasa yang sudah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan, kondisi, atau bisa juga rasa yang nyaman dan bahagia yang disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan hidupnya yang bersifat materi maupun non materi. Hal ini juga menunjukkan bahwa untuk membahas teori kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dengan teori tentang kebutuhan. Dengan kata lain, kesejahteraan bisa terwujud apabila semua kebutuhan hidup manusia terpenuhi.

Teori Kebutuhan

a. Perspektif Barat

Teori tentang kebutuhan yang paling populer dari dunia Barat adalah teori kebutuhan yang dibangun oleh Abraham Maslow. Maslow adalah seorang psikolog yang pemikirannya banyak dimanfaatkan dalam ilmu manajemen dan pendidikan. Pemikirannya juga memiliki implikasi pada ranah filosofis yang dapat membantu beberapa pertanyaan klasik tentang apa dan siapa manusia. Selain itu, Maslow bukanlah seorang materialis ataupun platonis. Dia memiliki pandangan bahwa manusia tidak hanya terdiri dari roh namun juga materi. Karenanya, benar bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan fisiknya lebih dulu. Jika tidak, ia akan mati. Di sisi lain, kebutuhan akan sesama juga penting. Di sinilah Maslow ingin menunjukkan bagaimana manusia dengan berbagai kebutuhannya dapat mengaktualisasikan diri menjadi manusia utuh (Leahy, 1993).

Pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan tidak bisa lepas dari teori motivasi yang menjadi landasannya. Ada tujuh belas konsep dasar yang

digunakan Maslow dalam memahami manusia secara menyeluruh, di antaranya adalah: *Pertama*, manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. *Kedua*, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak bisa dilokasikan pada satu jenis kebutuhan tertentu. *Ketiga*, kajian tentang motivasi harus menjadi bagian dari studi tentang puncak tujuan manusia. Keempat, teori motivasi tidak dapat mengabaikan tentang kehidupan bawah sadar. *Kelima*, keinginan yang mutlak dan fundamental manusia adalah tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. *Keenam*, keinginan yang muncul dan disadari, seringkali merupakan pencetus dari tujuan lain yang tersembunyi. *Ketujuh*, teori motivasi harus mengasumsikan bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir, dan masih ada beberapa konsep dasar lainnya (Goble, 1971).

Berdasarkan teori kebutuhan yang dia kembangkan, muncul model kebutuhan pokok atau *basic human needs approach* tahun 1976, yaitu pada saat diadakannya konferensi ILO (International Labour Office) di Kenya. Model kebutuhan dasar ini menjadi dasar strategi pembangunan setiap negara untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya (Soejdatmoko, 1978). Abraham Maslow, seperti yang dikutip Gibson et al., (1996) membagi kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritas yang disusun secara hierarkis, yaitu:

- Kebutuhan Fisiologi (*Physiological Needs*) mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Ini adalah kebutuhan dasar sehingga menjadi prioritas manusia untuk memenuhinya dan memungkinkannya untuk meninggalkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.
- Kebutuhan Jaminan Sosial (*Safety Needs*) mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
- Kebutuhan Sosial (*Social Needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
- Kebutuhan Akan Penghargaan (*Esteem Needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan memengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
- Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization Needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi (Gibson et al., 1996).

Pada tahun 1970, Maslow merevisi idenya lagi tentang kebutuhan berkembang menjadi tujuh macam. Jadi, selain lima kebutuhan yang sudah

dijelaskan di atas, ditambah dua kebutuhan lagi, yaitu hasrat untuk tahu dan memahami dan kebutuhan estetik (Goble, 1971). Teori hierarki kebutuhan Maslow tersebut bisa digambarkan sebagai bangunan sebuah piramida.

Kebutuhan pertama (pokok atau dasar) manusia adalah kebutuhan yang terletak dalam bagian paling bawah, yaitu kebutuhan fisik, dan kebutuhan aktualisasi diri berada pada paling atas atau puncak. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang utama yang harus dipenuhi; setelah itu baru kebutuhan kedua, setelah kebutuhan kedua terpenuhi baru memenuhi kebutuhan ketiga, dan berlanjut kepada pemenuhan kebutuhan setelahnya secara berjenjang.

Sesuatu itu disebut sebagai kebutuhan dasar apabila memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

1. Bila tidak terpenuhi dapat menimbulkan penyakit,
2. Memenuhinya dapat mencegah timbulnya penyakit,
3. Pemulihannya dapat menyembuhkan penyakit,
4. Dalam situasi-situasi tertentu yang sangat kompleks, orang bebas memilih (seseorang yang sedang kekurangan, akan cenderung memilih kebutuhan dibanding kepuasan lainnya),
5. Kebutuhan itu tidak aktif, lemah, atau secara fungsional tidak terdapat pada orang yang sehat (Goble, 1971).

Dalam dunia ekonomi dan manajemen manusia, kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut :

- Pemenuhan kebutuhan fisiologi, antara lain, dapat diaplikasikan dalam hal pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan), pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
- Pemenuhan kebutuhan jaminan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, jaminan sosial kerja, lingkungan kerja yang nyaman, dan terhindar dari segala risiko yang mengancam.
- Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok, dan kesempatan berinteraksi sosial.
- Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikansi aktivitas pekerjaan, dan pengakuan publik terhadap kinerja yang baik.
- Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat diaplikasikan dalam hal kebebasan dalam berekonomi dan pilihan dalam berkreativitas dan tantangan pekerjaan (Gibson et al., 1996).

Menurut Maslow sebagaimana dikutip oleh Buchari dan Zainun (2001), kebutuhan dasar manusia tingkat tertinggi adalah *the needs for self-actualization* (Buchari dan Zainun, 2001). Kebutuhan ini adalah kebutuhan seseorang untuk mengaktualisasikan cita dan keinginan dengan menampilkan potensi bakatnya yang luar biasa. Seseorang yang mempunyai bakat dan potensi sebagai atlet akan merealisasikan bakat dan seluruh daya yang ia miliki untuk menjadi juara dalam turnamen. Ciri yang amat khusus pada jenis kebutuhan ini ialah bahwa, dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang akan merasa luar biasa terhadap dirinya. Kekaguman terhadap hasil karyanya kadang-kadang menenggelamkan segala macam godaan. Perhatiannya terpusat kepada pekerjaannya sehingga kadang-kadang orang demikian bahkan lupa dengan kebutuhan pokok fisiknya sendiri.

Sari dan Dwiarti (2018) mengkritisi teori kebutuhan Moslow pada dua aspek, yaitu:

1. Menurut teori ini, kebutuhan manusia itu memiliki tingkatan, namun pada kenyataannya kebutuhan manusia tersebut bisa terpenuhi sekaligus, dan kebutuhan manusia itu merupakan siklus yang terus berulang-ulang.
2. Teori ini belum pernah dilakukan uji coba kebenarannya secara empiris karena pada dasarnya Maslow mengembangkan teorinya sesuai pengalamannya (Sari & Dwiarti, 2018).

Teori kebutuhan yang dibangun oleh Abraham Maslow ini meninggalkan kebutuhan agama dalam model hierarkinya. Agama tidak dimasukkan sebagai bagian dari kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan teori kebutuhan yang dikembangkan oleh As Syatibi maupun Al-Ghazali, ilmuwan-ilmuwan muslim yang lebih dahulu mengembangkan teori kebutuhan manusia jauh sebelum Abraham Maslow menjadikan agama sebagai kebutuhan pokok yang paling mendasar.

b. Perspektif Islam

As Syatibi yang hidup pada tahun 720-790 H dalam kitabnya *al Muafawaqat* menjelaskan bahwa tujuan syariah Islam adalah terpeliharanya manusia dari pemenuhan hak dasar kehidupan manusia. Pemenuhan hak dasar kehidupan manusia itu kemudian disebut dengan *mashalah*. Berdasarkan metode *ijtihad istinbati* tujuan syariah dalam rangka pemenuhan hak-hak terbagi menjadi: (1) *masalahah dharuriyah*, (2) *mashlahah hajaiyyah*, dan (3) *mashlahah tahsiniyyah*.

Maslahah daruriyyat (primer) adalah kebutuhan yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan

dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, maka akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia bahkan hilangnya kehidupan manusia itu sendiri. *Mashlahah dharuriyah* merupakan kebutuhan dasar berupa terpilihannya manusia dari hak pemenuhan kebutuhan 5 aspek, yaitu:

1. Agama (*ad- dīn*), misalnya aqidah dan ibadah
2. Jiwa (*an-nafs*), seperti hak untuk hidup, makan, minum, kesehatan, dan lain-lain
3. Akal pikiran (*al- ‘aql*), contohnya belajar, berkreasi, dan lain-lain.
4. Keturunan (*an-nasl*), seperti kesehatan, perkawinan, pendidikan dan lain-lain
5. Harta bendanya (*al- māl*), misalnya berbisnis, produksi dan lain-lain.

Tingkat kedua, *mashlahah hajaiyyah* (sekunder), adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari kesulitan. Namun kalau *masalahah* ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun akan berimplikasi adanya kesusahan (*masyaqqah*). Beliau mencontohkan ini dalam aspek muamalah seperti kebolehan dalam transaksi bisnis, misalnya *qard, musyarakah, musaqqah*, dan lain-lain.

Tingkat ketiga ialah *masalahah tahsiniyyah*, yaitu suatu masalah yang jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan sebaliknya apabila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesusahan *mashlahah* tingkat ketiga ini berkaitan dengan melaksanakan norma dalam masyarakat dan anjuran agama Islam yang bersifat sunnah, seperti mengadakan acara perkawinan, bersedekah, dan lain sebagainya (Al- Syatiby, 1982).

Ulama lain, yaitu Abi al-Fadl Ja’far ad- Dimasyqi (685 H) bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia (al-insaniyyah) dibagi menjadi dua, yaitu *Pertama, al-hajat ad- daruriyyah at-tabi’iyyah* (kebutuhan berdasarkan tabiat manusia) seperti beragama, mempunyai rumah, pakaian dan makanan. *Kedua, al- hajatal- ‘irdiyyah al-wad’iyyah*, seperti perlindungan dan keselamatan (Abu al-Fadl Ja’far Ad-Dimasqi, 1977). Sedang Ibnu Khaldun, pakar antropologi dan sosiologi Islam, menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terbagi menjadi *ad-daruriy* (primer), seperti makanan-makanan yang menimbulkan kekuatan, *al-haji* (sekunder), dan *al-kamali* (pelengkap) (Ibn Khaldun, 1983).

Ulama lainnya yang menjelaskan kebutuhan lebih rinci adalah Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali mengenai kebutuhan hampir memiliki persamaan dengan teori yang digagas oleh Maslow yang muncul belakangan setelahnya. Keduanya juga memiliki pandangan yang mirip

terhadap manusia (Muazarah & Subaidi, 2019). Perbedaan kedua pemikiran ini terletak pada pendekatan yang mereka gunakan. Al Ghazali menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dengan metode istinbathi, sedangkan Maslow menggunakan pendekatan naturalistik (Muazarah dan Subaidi, 2019). Oleh karena itu, dalam menjelaskan struktur manusia antara Al-Ghazali dan Maslow. Al-Ghazali menjelaskan adanya struktur jiwa dari diri seseorang yang meliputi *qalb, ruh, nafs, dan aql*. Unsur-unsur inilah yang kemudian menjadi *nafs rabbaniyyah*. Sedangkan Maslow memberikan pengertian bahwa manusia adalah kesatuan utuh meliputi jiwa dan raga yang bernilai baik dan memiliki potensi sehingga sampai pada aktualisasi diri (Muazarah & Subaidi, 2019)

Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama, yang menjadi suatu keniscayaan (*level of necessity*) yaitu kebutuhan primer (*darury*) yang bertujuan pada pencapaian lima hal paling mendasar, yaitu *hifdzuddin* (perlindungan agama), *hifdzunnafs* (perlindungan jiwa), *hifdzulmal* (perlindungan harta), *hifdzul aql* (perlindungan akal), dan *hifdzun nasl* (perlindungan keturunan). *Daruriyat* inilah yang dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia itu sendiri (Rohman, 2012). Menurut Al-Ghazali agama harus menjadi prioritas yang paling pertama karena pusat dari maqasid adalah memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Karena agama sangat memperhatikan manusia, baik dari segi bathiniyah maupun lahiriyah. Maka, jika agama seseorang terjaga, niscaya akan mengantarkannya pada kebaikan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tingkatan kedua, sekunder (*hajiyyat*), ialah menyangkut kepentingan atau masalah yang sifatnya sekunder. Sekiranya aspek *hajiyyi* ini tidak/belum terwujud, tidaklah membawa atau menimbulkan bencana atau kerusakan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi manusia. Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *daruri*. Contohnya adalah kebutuhan terhadap tempat tinggal agar manusia terlindungi dari cuaca ataupun serangan binatang buas.

Tingkatan ketiga, tersier (*tahsiniyat*), yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap dan penyempurna (Auda, 2013). Semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan lebih nyaman dan lebih mudah. Kebutuhan ini tidak menyentuh kepada kegiatan atau sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok atau substansial bagi kehidupan, tetapi hanya berhubungan dengan sesuatu yang menjadi fasilitas, tata cara, atau upaya menghasilkan barang-barang yang dapat mempermudah pemenuhan dan perlindungan *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat* yang sudah disebutkan

sebelumnya. Contoh: tidur di atas kasur, memasak makanan, menyediakan berbagai jenis bumbu. Berdasarkan pendapat beberapa ulama yang sudah dijelaskan, diantaranya Al-Syatibi, Al-Damsyiqi, Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali menyebut kebutuhan dasar dengan istilah *dharuriy*, dimana agama adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia (*dharuriy*).

Terdapat persamaan antara kebutuhan menurut teori Maslow dan *maqashid syariah*, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk keberlangsungan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Namun juga terdapat perbedaan kebutuhan perspektif Islam dengan teori kebutuhan perspektif Barat, yaitu terletak pada aspek agama sebagai bagian dari kebutuhan dasar. Dengan kata lain, orang tidak beragama namun terpenuhi kebutuhan pokok yang lain seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian sudah dianggap sejahtera (secara dasar) namun menurut perspektif Islam sebaliknya, terpenuhi sandang, pangan, dan papan belum bisa dianggap sejahtera (secara dasar) selama manusia tidak terjamin haknya untuk mempunyai aqidah dan ibadah serta bermuamalah sesuai aturan yang diyakini menurut agamanya.

Terdapat perbedaan antara ulama-ulama Islam dan Maslow dalam urutan prioritas kebutuhan. Para ulama menjadikan perlindungan agama sebagai kebutuhan paling utama, sedangkan Maslow menempatkan kebutuhan pemenuhan jiwa. Namun ada juga suatu pendapat yang berbeda dengan para jumbuh ulama Islam dalam mengurutkan prioritas dalam *maqashid syariah*. Pendapat itu menjelaskan bahwa dalam *maqashid syariah*, urutan pertama adalah perlindungan terhadap jiwa sebab pemenuhan perlindungan terhadap jiwa akan bisa membuat manusia melindungi *maqashid* yang lainnya seperti agama, keturunan, dan harta (Larsen & Moe, 2009). Manusia apabila tidak terpenuhi kebutuhan jiwanya seperti makan maka akan cenderung mengabaikan kebutuhan lainnya seperti kepatuhan terhadap agama, menikah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendapat ini sejalan dengan pendapat Maslow yang menempatkan pemenuhan kebutuhan jiwa sebagai prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan. Pemikiran Maslow akan kebutuhan fisik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasca Perang Dunia II. Saat itu, manusia berada dalam kondisi yang begitu memilukan. Salah satunya adalah dilandanya kelaparan. Oleh karena itu, Maslow menganggap kebutuhan fisik adalah yang utama melebihi apapun (Muazarah & Subaidi, 2019).

Di sisi lain, dalam melihat kebutuhan juga terdapat perbedaan sudut pandang antara para ulama dan Maslow. Para ulama menggunakan istilah “perlindungan,” sedangkan Maslow menggunakan istilah “pemenuhan.” Perbedaan ini akan menimbulkan perbedaan makna dalam memahami

kebutuhan. Para ulama yang menggunakan model maqashid syariah menjelaskan bahwa perlindungan artinya suatu keniscayaan, keharusan tanpa mempertimbangkan kondisi dan waktu. Artinya, dalam rangka melindungi, seseorang harus menggunakan semua sumber daya yang ada untuk menghalangi kerusakan dan kemusnahan dari setiap hal dan kondisi. Sedangkan makna pemenuhan seperti istilah yang digunakan Maslow dalam kebutuhan, memerlukan syarat seperti kondisi dan aspek-aspek tertentu agar kegiatan pemenuhan tersebut dapat dilakukan. Sehingga kata “perlindungan” lebih memiliki makna yang lebih penting dari kata “pemenuhan.”

Perbedaan yang lain antara ulama Islam dan Maslow dalam menjelaskan kebutuhan manusia adalah perlindungan terhadap agama bukan menjadi kebutuhan manusia dalam pandangan Maslow. Agama Islam menjelaskan bahwa kehidupan manusia tidak hanya di dunia, namun ada kehidupan lain yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan hidup bukan hanya untuk kebutuhan hidup di dunia namun juga di akhirat. Selain itu, tujuan penciptaan manusia menurut ajaran Islam adalah kepatuhan kepada Allah. Oleh karena itu, agama harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia.

Dalam metode *ijtihad istinbathi* dalam maqashid syariah memungkinkan bahwa kebutuhan tidak hanya berhenti pada perlindungan lima maqashid syariah yang sudah dijelaskan, seperti perlindungan agama (*hifzu al din*), perlindungan jiwa (*hifzu al nafs*), perlindungan akal (*hifzu al aql*) perlindungan keturunan (*hifzu al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzu al mal*) namun juga bisa berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan. *Ijtihad thalbiqi* adalah *ijtihad* dalam rangka menemukan nilai, ide, dan moral yang masih abstrak di dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Objek *ijtihad istinbathi* adalah teks yang terdapat di dalam nash sedangkan objek *ijtihad thalbiqi* adalah manusia dan kehidupannya yang mengalami perubahan dan perkembangan. Misalnya, Hamka Haq menambahkan menjaga *jama'ah* (persatuan umat) sebagai bagian dari maqashid syariah (Haq, 2007). Oleh karena itu, kebutuhan dalam maqashid syariah bisa saja berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia yang dinamis, seperti misalnya *hifzu al istiqlal* (perlindungan terhadap kemerdekaan); kemerdekaan adalah bagian dari kebutuhan manusia.

Konsep Kesejahteraan Perspektif Islam dan Barat

a. Perspektif Barat

Berdasarkan teori tentang kebutuhan, maka lahirlah konsep kesejahteraan. Pemenuhan akan kebutuhan hidup manusia kemudian

disebut dengan kesejahteraan. Dalam ekonomi kapitalisme, kesejahteraan diukur dari seberapa banyak barang diproduksi dan dikonsumsi; mereka menggunakan pendekatan materialisme. Kesejahteraan menurut kapitalisme adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi setiap individu, penghapusan kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil di antara seluruh rakyat (Fuadi dan Santosa, 2015). Oleh karena itu sangat wajar, kesejahteraan didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan materil manusia sesuai dengan hasil kerja optimal masing-masing orang atau kelompok.

Sedangkan sosialisme melihat kesejahteraan dengan pendekatan komunal. Kesejahteraan bisa dicapai melalui pemerataan yang diatur oleh negara atau pemerintah, agar supaya terjadi keadilan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang begitu besar dan kuat dalam menyelenggarakan dan mensukseskan kesejahteraan manusia terutama rakyat negaranya tersebut (Amri, 2017).

Pendekatan materialisme dan positivisme menjadikan konsep kesejahteraan dalam perspektif Barat menafikan agama sebagai kebutuhan manusia dan ukuran sebuah kesejahteraan. Hal ini menjadikan para ekonom muslim mengkritik konsep kesejahteraan yang ditawarkan kedua sistem ekonomi tersebut serta menyerukan perlunya ekonomi Islam sebagai solusi dari kekurangan dua sistem ekonomi ini. Baqir al Shadr misalnya, menyatakan bahwa sistem Kapitalisme justru mendorong terbentuknya industri korporasi (perekonomian didominasi oleh sebagian kecil orang saja), melegalkan monopoli dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan sehingga kesejahteraan hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang dalam suatu masyarakat (Karim, 2017).

Menurut Mannan (2017), ideologi Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme, dan Fasisme cenderung lebih menekankan aspek solidaritas individual dan menihilkan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya (Mannan, 2017). Chapra mengatakan bahwa sistem kapitalis dan sosialis tidak dapat berperan sebagai model bagi negara-negara muslim karena hanya menguntungkan satu pihak saja. Kesejahteraan dalam kapitalisme terletak pada penguasa modal, sedangkan dalam sosialisme terletak di tangan pemegang otoritas politik (Chapra, 2000). Maka dapat dipahami konsep kesejahteraan perspektif Barat adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang bersifat fisiologis untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia.

b. Perspektif Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam dihasilkan dari metodologi *ushul fiqh*, yaitu *maqashid syariah*. Dalam metodologi ini terdapat *ijtihad*

istinbathi dan *ijtihad tathbiqi* yang merupakan pengintegrasian doktrin Islam dan realitas kehidupan (empiris). Metodologi ini lahir dari pandangan dan keyakinan umat Islam akan kebenaran doktrin Islam dan menjadikan sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai sumber ilmu pengetahuan. Keyakinan seperti ini dalam filsafat ilmu disebut dengan *worldview*.

Dari metodologi *maqashid syariah* melahirkan konsep kebutuhan manusia. Berdasarkan teori kebutuhan, maka menghasilkan konsep kesejahteraan. Dengan kata lain, kesejahteraan (*maslahah*) adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebutuhan hidup menurut Islam terbagi secara hierarki menjadi tiga, yaitu *dharuriyah* (primer), *hajaiyyah* (*sekunder*), dan *tahsiniyyah* (tersier). Seseorang akan dianggap sejahtera apabila terpenuhi semua bentuk kebutuhan hidupnya ini.

Salah satu yang membedakan kesejahteraan dalam konsep Islam dan Barat adalah terpenuhinya kebutuhan terhadap agama. Selain itu, dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek individu tapi juga sosial. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 46:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban manusia, yaitu menyembah Allah dan berbuat kebajikan kepada orang lain, yaitu orang tua, keluarga, tetangga, teman, dan golongan lemah seperti anak yatim, orang miskin, budak, dan musafir. Manusia yang melakukan kewajiban tersebut disebut dengan orang yang bertaqwa, dan orang yang bertaqwa disebut dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah 2-5 sebagai *mufihlihin*.

Mufihlihin berasal dari *aflaha-yuflihu* yang berarti orang yang sejahtera, orang yang berbahagia, atau orang yang beruntung. Banyak sekali bentuk lain dari kata ini dalam Al-Qur'an, seperti *yuflihu*, *yuflihun*, *aflaha*, *tuflihu*, *tuflihuun*, dan *muflihiin*. Semua kata ini berarti terpenuhinya keinginan, kebutuhan, dan bersifat kekal (Fajriah, et al., 2016). Kata ini digunakan para akademisi dalam menjelaskan kesejahteraan dalam Islam seperti Khan (1989) dan Nasrullah (2021)[MOU9][lh10]. *Al Falah* berarti kesejahteraan yang tidak hanya bersifat materialistis namun juga ukhrawi.

Oleh karena itu, kesejahteraan (*al Falah*) dalam Islam baik ditinjau dari segi individu maupun sosial, adalah terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Berdasarkan konsep ini, bagi seorang muslim yang ingin mencapai kesejahteraan, harus mempraktikkan nilai-nilai agama sehingga konsep kesejahteraan dalam Islam akan melahirkan etika dan moral yang mulia (*akhlak mahmudah*).

Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Dalam ekonomi, indikator kesejahteraan selalu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan materi tanpa memuat variabel religiusitas dan moral. Seperti penelitian yang dilakukan [Sugiharto (2007)][MOU11][lh12] menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Berbeda dengan indikator kesejahteraan dalam Islam, yang menjadikan religiusitas dan moral sebagai bagian dari alat ukur kesejahteraan. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al Quraisy ayat 3-4, "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.*" Berdasarkan ayat ini, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Allah, bebas dari kelaparan, dan rasa takut. Indikator pertama untuk kesejahteraan yaitu kepatuhan (ibadah) kepada Allah, yang merupakan perwujudan ketergantungan manusia kepada Pemberi kesejahteraan. Fakta menunjukkan banyak orang yang terpenuhi kebutuhannya secara materi namun tidak mendapatkan kepuasan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang berserah diri kepada Allah akan senantiasa berharap tanpa berputus asa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; sebaliknya, orang yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya akan senantiasa bersyukur dan tercipta rasa empati dan berbagi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti makanan, tempat tinggal, alat transportasi, komunikasi, dan lain-lain). Menariknya dari ayat ini, pemenuhan kebutuhan itu bersifat seperlunya (hilang rasa lapar), tidak berlebih-lebihan. Jadi pemenuhan materi yang berlebihan dalam Islam tidak menunjukkan

kesejahteraan bagi seseorang, namun malah menimbulkan rasa ketakutan kehilangan harta yang akan membuat dia serakah dan lain-lain. Di sisi lain, hilang rasa takut atau rasa aman, nyaman, dan kedamaian merupakan indikator kesejahteraan yang ketiga dalam Surah Al Quraisy ini. Hilangnya rasa lapar sebagai indikator kesejahteraan ini juga dikuatkan oleh ayat yang lain yang menyuruh umat Islam agar tidak menjadi orang miskin, di antaranya yaitu An-Nisaa' ayat 9: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.*" Kalau dijelaskan secara sederhana, Allah menyuruh umat Islam agar tidak mewariskan kemiskinan kepada keluarganya, yang berarti umat Islam harus menjadi kaya.

Menurut Beik dan Arsyianti (2019), [MOU13][lh14] konsep kesejahteraan memiliki empat indikator utama yaitu sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial. Nilai ajaran Islam merupakan dasar dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Hal ini bisa dimaknai bahwa kesejahteraan seseorang atau rumah tangga akan tercapai hanya jika menerapkan nilai-nilai syariat Islam, karena selain memberikan kesejahteraan juga akan mendatangkan keberkahan.

Pada indikator kedua, kesejahteraan akan dicapai apabila kegiatan ekonomi pada sektor riil berjalan, yaitu aktivitas dan akses terhadap industri dan perdagangan bisa didapatkan. Hasil dari kegiatan ekonomi tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat dengan sistem distribusi yang tepat. Hal ini merupakan indikator ketiga dalam konsep kesejahteraan.

Pada indikator terakhir, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Mendapatkan rasa aman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila terdapat keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Khan (1989) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan (*falāḥ*) meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan dalam Islam meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu kebutuhan religius, seperti beribadah dan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan agama, kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu, kebutuhan yang dipenuhi adalah kebutuhan sosial seperti toleransi, keamanan dan persatuan.

4. Kesimpulan

Konsep kesejahteraan menurut ajaran Islam sebenarnya lebih dahulu dijelaskan oleh ilmuwan muslim sebelum ilmuwan Barat merumuskan konsep kesejahteraan. Terdapat persamaan antara ilmuwan Islam dan Barat dalam membagi kebutuhan, yaitu pembagian secara hirarki kebutuhan pokok (primer), sekunder dan pelengkap (tersier) namun yang membedakan adalah ilmuwan Barat menghilangkan agama sebagai kebutuhan manusia, sedangkan Islam sebaliknya menjadikan agama sebagai kebutuhan utama bagi manusia. Perbedaan dalam teori kebutuhan ini menghasilkan perbedaan konsep tentang kesejahteraan di antara keduanya. Menurut ilmuwan Barat kesejahteraan adalah terpenuhinya semua tingkatan kebutuhan materi manusia baik individu maupun sosial. Sedangkan, konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan spiritual baik bagi individu maupun sosial. Kesejahteraan adalah tujuan dari suatu ekonomi karena ekonomi adalah perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dari sumber daya. Oleh karena itu, perbedaan konsep kesejahteraan antara perspektif Barat dan Islam juga melahirkan etika ekonomi yang berbeda antara masyarakat Barat dan Muslim. Konsep kesejahteraan perspektif Islam akan menjadikan masyarakat mempraktikkan ekonomi dengan nilai, etika dan moral (*akhlak mahmudah*). Sebaliknya konsep kesejahteraan perspektif Barat akan menjadikan utilitarianisme sebagai etika dalam ekonomi. Etika Utilitarianisme memandang bahwa moralitas ditentukan dari konsekuensi perilaku manusia.

Daftar Pustaka

- Abu al-Fadl Ja'far Ad-Dimasqi. (1977). *Al-Isyarah ila Mahasi at-Tijarah*, Beirut: Maktabah al-Azhariyyah.
- Amri, H. (2017). Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam Karyanya Fundamental Of Islamic Economic System. *Economica Sharia*, 2(2).
- Auda, J. (2013). *Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Buchari, Z. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fajriah, S., Junaedi, D., & Maimun, M. (2016). Al-Falah dan Al-Farah (Studi Ma'anil Qur'an dan Tafsir Tematik dalam Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Diya al-Afkar*, 4(2).

- Fuadi, A. & Santosa, P. B. (2015). Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State), *JDEB* 12(1).
- Furqani, H. (2018). *Metodologi Ekonomi Islam, Membangun Paradigma dan Format Keilmuan*. Banda Aceh: NASCA & Pascasarjan UIN Ar-Raniry.
- Goble, F. G. (1971). *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Terj. A. Supratinya, Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. Jr. (1996). *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Terj. Nunuk Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Haq, H. (2007). *Al Syatibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al Muwafaqt*. Jakarta: Erlangga.
- Karim, A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Khan, M. A. (1989). *Economics Teachings of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics.
- Larsen, L. & Moe, C. (1993). *New Directions in Islamic Thought, Exploring Reform and Muslim Tradition*. London: I.B Tauris.
- Leahy, L. (1993). *Manusia Sebuah Materi, Sintesis Filosofis tentang MakhluK Paradoksal*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Lukman, A. (1996). *Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Depdikbud.
- Mannan, M. A. (1980). *Islamic Economics, Theori and Practice*, India: Idarah Adabiyah.
- Muazarah, S. & Subaidi. (2019). *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*. *Al-Mazahib*, 7(1).
- Rohman, A. (2012). *Konsep Kebutuhan dan Keinginan Imam Al-Ghazali*. *Edu Islamika*, 4(1).
- Sari, E., Dwiarti, R. (2018). *Pendekatan Hierarki Abraham Maslow pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madubaru (Pg Madukismo)*, Yogyakarta, *JPSB*, 6(1).
- Sidney, A. & Hornby, J. C. (1995). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, England: Oxford University.
- Soejdatmoko (1978). Berbagai Implikasi Kebijakan Nasional dari Model Kebutuhan Dasar. *Jurnal Prisma*, 10, 59-79.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.